

Pola Relasi Sosial Elit Tradisional: Kasus Desa Rana Mbeling, Kabupaten Manggarai Timur, NTT

Oleh: Lasarus Jemahat

ABSTRACT

Social relationship between tua golo and tua teno have typical pattern. As we know that the relationship pattern between tua golo and tua teno have the character of subordinative and coordinative. Relationship having the character of subordinative happened because social structure of society of Manggarai as a whole place one of the social elite on course above from each other. Here is, tua golo have position which is important to be compared with tua teno. Because tua golo is the head of kampong and tua golo determining the position of tua teno as institute managing or dividing land. The implication of the relationship model like this is tua teno have to ask permission of tua golo in every activity related to custom and land. Whereas relationship having the character of coordinative happened when tua golo and tua teno sit with in one forum to discuss things related to problem of kampong or other of social problem.

Kata Kunci: *Elit, Relasi Sosial, Konflik*

I. PENDAHULUAN

Berbagai kebijakan pencangkakan institusi baru ke dalam suatu masyarakat desa dapat memberikan implikasi negatif bagi perkembangan institusi lokal. Dalam kondisi seperti itu, berbagai institusi lokal menjadi gamang, antara mengikuti dan menerapkan norma adat dengan berbagai konsekuensinya atau harus menerima sesuatu yang baru (Undang-Undang) yang datang dari luar. Determinasi yang kuat dari negara membuat masyarakat tidak memiliki pilihan lain kecuali melaksanakan sesuatu yang baru tersebut meskipun bertentangan dengan kondisi sosial budaya setempat. Akibatnya, elit lokal kehilangan pegangan dan legitimasinya sebab perannya digantikan

oleh kepala desa, polisi, jaksa dan berbagai unsur negara. Pada aras lokal, pengaburan peran seperti ini dapat berakibat fatal karena perubahan struktur sosial dapat mempengaruhi perubahan sub sistem sosial yang lainnya. Persis di sinilah titik sentuh konflik antara *tua golo*¹ versus *tua teno* dalam konteks Manggarai Timur. Dengan logika yang sama, perubahan struktur masyarakat Desa Rana Mbeling Manggarai Timur saat ini perlu dikaji lebih jauh, sebab

¹ *Tua golo* sering disebut kepala kampung. Dalam struktur sosial Manggarai pada umumnya, *tua golo* adalah otoritas yang memiliki hak ulayat atas *lingko* (lahan). *Tua teno* adalah orang yang diberi otoritas oleh *tua golo* untuk mengurus dan membagi tanah

sebagaimana masyarakat lain di Indonesia, masyarakat Desa Rana Mbeling juga tengah berada dalam perubahan². Perubahan struktur sosial masyarakat yang diikuti dengan munculnya implikasi praktisnya menarik untuk diamati sebab sejak dulu masyarakat Manggarai pada umumnya adalah masyarakat yang selalu mencintai perdamaian. Hal ini terutama dilihat dari model struktur kekerabatan yang mengikatnya³.

Saat ini di daerah penelitian, muncul kecenderungan *tua teno*

mengklaim hak *tua golo* atas kepemilikan lingko (lahan) tertentu yang mestinya menjadi hak ulayat *tua golo*⁴. Fenomena ini menjadi menarik karena selain pihak yang terlibat adalah otoritas elit tradisional yang mestinya menjaga struktur sosial masyarakat tetap stabil. aktor yang berkonfliknya juga berbeda dengan di Manggarai pada umumnya⁵. Jika merujuk temuan Lawang, di Manggarai pada umumnya konflik terjadi antara *tua golo versus tua golo*⁶ atau *antargolo vs pemerintah* sedangkan di lokasi penelitian ini, konflik justru terjadi antara *tua golo versus tua teno* dan bukan antara *tua golo versus tua golo*⁷.

² Gambaran perubahan sosial di Manggarai dapat dilihat dari hasil penelitian Ulla Keech-Marx 2002. Komersialisasi Tenunan Songke: Dampaknya Terhadap Masyarakat Manggarai: Studi Kasus di Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, Flores, NTT, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, kerjasama dengan Australian Consortium For In-Country Indonesian Study (Acicis) dan South-East Asia Centre Australian National, hal. 14. Lihat juga Samuel Clark (Ed.), 2004, *Bukan Sekedar Persoalan Kepemilikan : Sepuluh Studi Kasus Konflik Tanah dan Sumber Daya Alam dari Jawa Timur dan Flores*, Conflict and Community Development Research and Analytical Program Indonesian Social Development Paper No. 4

³ Robert M.Z. Lawang, 2004. *Stratifikasi Sosial di Cancar Manggarai Flores Barat Tahun 1950-an dan Tahun 1980-an*. Jakarta: Penerbit UI-Press, hal. Xvii-xix dan Robert M.Z. Lawang, 1999. *Konflik Tanah di Manggarai Flores Barat*, Penerbit UI-Press. Secara administratif pemerintahan, Manggarai di sini mengacu pada sebuah kabupaten yang terletak dibagian barat Pulau Flores yakni Kabupaten Manggarai. Dalam perkembangan saat ini Kabupaten Manggarai dibagi/dimekarkan menjadi tiga kabupaten yakni Kabupaten Manggarai sebagai kabupaten induk, Kabupaten Manggarai Barat (2003), dan Kabupaten Manggarai Timur (2007).

⁴ Beberapa contoh kasus konflik tanah yang melibatkan *tua golo versus tua teno* yakni, kasus tanah sekolah SDK Watu Weri, SLTPN 3 Kota Komba yang berkedudukan di Watu Weri, Kasus tanah Lekolelang, dan kasus tanah milik Desa Rana Mbeling di sekitar kantor desa (Laporan Tahunan Kepala Desa Rana Mbeling, 2007. Kantor Desa Rana Mbeling)

⁵ Dalam studi tentang kasus konflik tanah di Manggarai dan Manggarai Barat, Lawang menemukan bahwa aktor yang berkonflik adalah *tua golo vs tua golo*, atau *golo vs pemerintah*, sedang di Desa Rana Mbeling, dalam beberapa kasus, justru terjadi antara *tua golo vs tua teno*.

⁶ Robert M.Z. Lawang. *Op. Cit.* Hal. 92

⁷ Menurut catatan pemerintah Kabupaten Manggarai, seperti yang dikutip Lawang (1999), paling tidak sudah terjadi 20 jenis konflik tanah dan jika dikategorikan menurut waktu telah terjadi 43 kali konflik tanah di Manggarai dalam rentangan waktu 1994-1999. Sampai tahun 1995, korban meninggal sebanyak 15 orang, luka berat 26 orang, luka ringan 39 orang. Sementara menurut catatan Walhi (2004 : 8), dalam kasus 10 Maret 2004 terdapat 6 orang meninggal dan 29 lainnya luka berat dan ringan. Sementara itu, Samuel Clark (Ed.) menyebutkan bahwa selama kurun waktu

II. DINAMIKA ELIT TRADISIONAL

Studi atau pun riset tentang elit sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Setiap eksponen memberi titik fokus tersendiri. Banyaknya fokus atau pandangan tentang elit menunjukkan urgennya fenomena ini. Seperti digambarkan Alfian⁸ dalam kata pengantar buku *Elit dan Masyarakat* Bottomore, studi tentang elit sudah dilakukan oleh Pareto pada abad ke sembilan belas, Mosca pada tahun 1930-an dan Mills pasca Perang Dunia II. Menurut Pareto⁹, setiap manusia memiliki kemampuan dan kapasitas yang berbeda. Kelompok yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang paling tinggi disebut elit. Pareto¹⁰ menyebutkan bahwa dalam masyarakat selalu terdapat dua jenis lapisan yakni lapisan yang rendah atau nonelit, yang tidak memiliki pengaruh dalam pemerintahan dan lapisan yang tinggi yang disebut elit. Lapisan yang tinggi dibagi menjadi dua kelompok besar yakni kelompok *elit* yang memerintah dan kelompok *elit* yang tidak memerintah. Elit yang memerintah adalah mereka yang berperan dalam pemerintahan, sebaliknya elit yang tidak memerintah adalah sisanya.

tahun 2000-2003, terdapat 44 kasus konflik berbasis pada tanah dengan 24 kasus kekerasan dan 15 kasus berakibat pada kematian.

⁸ Alfian, M M. Alfian. 2006. "Relevansi Studi Elit Di Indonesia". Dalam Kata Pengantar Editor buku *Elit dan Masyarakat*, T. B. Bottomore. Jakarta: Akbar Tanjung Institute.

⁹ T. B. Bottomore, 2006. *Elit dan Masyarakat* (Terj). Jakarta: Penerbit : Akbar Tanjung Institute, hlm. 2

¹⁰ *Ibid*

Mosca dalam Bottomore¹¹ mengemukakan bahwa masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, selalu dicirikan oleh perbedaan antara dua kelas manusia yakni kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai. Kelas yang berkuasa biasanya berjumlah sedikit dan memegang peranan penting dalam bidang politik. Kelompok ini menguasai kekuasaan dan menikmati berbagai macam keistimewahan yang diperoleh dari pelaksanaan kekuasaan; kelompok kedua merupakan kelas yang jumlahnya lebih banyak. Kelompok ini dikuasai dan dikendalikan oleh kelompok pertama di atas. Dalam pandangan Mosca, kelompok pertama lebih terorganisir sehingga mampu menguasai kelompok kedua di atas.

Dalam pandangan Bottomore, masyarakat saat ini pun selalu terdiferensiasi dalam lapisan-lapisan tertentu, atas-menengah-bawah. Basis fundamen stratifikasi adalah adanya kepentingan dari pihak tertentu. Elit selalu menunjuk pada kelas yang berkuasa. Kelas yang berkuasa inilah yang kemudian menjadi elit penguasa¹². Konsep elit seperti ini didasarkan pada analisis kelas Marxis. Mills mengkritik konsep kelas yang berkuasa yang dipaparkan Marx. Mills lebih memilih istilah elit penguasa¹³. Menurut Mills, dalam Bottomore¹³, konsep kelas yang berkuasa Marx terlalu bias ekonomi. Artinya, Jika mengacu pada konsep kelas seperti ini, terdapat elit ekonomi yang menguasai politik. Padahal menurut Mills, setiap komponen memiliki struktur kelasnya sendiri-sendiri dan

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

tidak terdeterminis hanya dalam wilayah ekonomi.

Keller menilai Pareto maupun Mosca tidak sama dengan Marx terutama dalam konteks dialektikal. Jika Marx melihat konflik terjadi karena adanya perebutan hak kelompok minoritas yang berkuasa oleh mereka yang tertindas, maka Pareto dan Mosca melihat konflik lebih karena adanya persinggungan kepentingan antara dua kelompok minoritas¹⁴. Namun demikian, Pareto dan Mosca tidak memberikan solusi berkaitan dengan relasi elit dan kelas-kelas sosial. Dalam pandangan Keller, kedua tokoh ini gagal memberikan penjelasan otentik tentang peran elit dalam konteks relasi kelas dalam masyarakat. Selain karena hanya berfokus pada politik, kajian kedua tokoh ini dianggap lemah justru karena mereka gagal merumuskan perbedaan antara elit kaya dengan orang kaya yang mungkin dapat menjadi bagian dari elit.

Keller¹⁵ menyebutkan dua perspektif yang mewarnai studi tentang elit yakni yang berfokus pada moral dan yang mengupas tentang peran fungsional elit. Perspektif pertama berfokus pada prasyarat moral bagi seseorang untuk dapat disebut elit dan pada gilirannya menjadi pemimpin. Sebaliknya perspektif kedua menekankan pada peran fungsional kaum elit dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat. Keller mendefinisikan elit sebagai berikut ”....Istilah elit di sini pertama-

tama menunjuk kepada suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial. Kaum elit adalah minoritas – minoritas yang efektif dan bertanggung jawab – efektif melihat kepada pelaksanaan kegiatan kepentingan dan perhatian kepada orang lain tempat golongan elit ini memberikan tanggapannya. Golongan elit yang mempunyai arti secara sosial akhirnya bertanggung jawab untuk realisasi tujuan-tujuan sosial yang utama untuk kelanjutan tata sosial....”¹⁶

Definisi elit menurut Keller di atas menunjukkan suatu cakupan yang sangat umum. Keller menempatkan elit pada posisi yang sangat ideal. Meskipun kemudian Keller lebih melihat elit dalam hubungannya dengan politik, dalam istilah Keller disebut elit penentu, tetapi jelas terlihat bahwa di sini elit dianggap sebagai sekelompok minoritas yang paling bertanggung jawab dalam keteraturan tatanan sosial. Pandangan seperti ini bukan tanpa persoalan. Pandangan idealis tentang elit cenderung menafikan watak buruk dari elit yang berupaya menguasai mayoritas masyarakat.

Jika *tua golo dan tua teno* dalam konteks masyarakat Manus-Manggarai Timur dianggap sebagai elit, maka pertanyaannya adalah elit dalam konteks seperti apa. Jika mengacu pada berbagai pendapat tentang elit di atas sebetulnya hanyalah segelintir orang. Jika *tua golo* dianggap sebagai kelompok bangsawan dalam struktur masyarakat

¹⁴Keller Suzanne,1995. *Penguasa dan Kelompok Elit* (Terj). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

Manggarai termasuk di Manus-Manggarai Timur, maka mestinya *tua teno* tidak dapat disebut elit. Namun demikian, oleh masyarakat setempat, kelompok yang terakhir ini (*tua teno*) juga disebut elit.

Elit dalam konteks penelitian ini mengacu pada pandangan Parreto dan Keller. Sebagaimana dipaparkan di atas, parreto membagi masyarakat menjadi dua kelompok yakni kelompok rendah (non elit) dan kelompok tinggi (kelompok elit). Kelompok elit terdiri dari dua bagian yakni elit yang memerintah dan elit yang tidak memerintah. Jika dielaborasi dengan Keller maka, seseorang atau sekelompok orang dapat disebut elit karena fungsinya dalam masyarakat. Oleh karena itu, *tua golo* dan *tua teno* dapat dianggap elit karena memiliki fungsi penting dalam struktur sosial masyarakat Manggarai pada umumnya. *Tua golo* sebagai pihak yang menguasai ulayat atas tanah/lahan, sedangkan *tua teno* sebagai pihak yang berfungsi untuk membagi tanah.

III. RELASI KEKUASAAN MARX DAN STRUKTUR OTORITAS DAHRENDORF

Teori memegang posisi penting dalam setiap penelitian. Urgensi teori terletak pada perannya dalam membantu peneliti untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis sebuah fenomena. Oleh karena peranannya yang penting tersebut maka setiap penelitian, terlepas pilihan metode penelitian apa yang dipakai, selalu menempatkan teori sebagai alat atau pisau analisis. Dalam sebuah penelitian yang menggunakan metode penelitian

kuantitatif, yang mengikuti logika deduktif, peneliti akan menguji sebuah teori manakala dihadapkan dengan fenomena sosial. Sementara itu, dalam ranah penelitian kualitatif, dengan mengikuti logika induktif, teori akan berperan sebagai *guidance* dalam menganalisis fenomena sosial. Disebut *guidance* karena teori digunakan sebagai alat untuk membimbing peneliti dalam memahami fenomena sosial. Dalam penelitian yang memakai metode kualitatif, teori tidak diuji atau tidak memberikan *judgement* atas fenomena sosial. Dengan berpedoman pada teori yang dipakai, peneliti berupaya mencari, menemukan, dan menganalisis berbagai macam fenomena sosial.

Dalam konteks penelitian ini, fenomena distorsi peran elit dalam kaitannya dengan konflik tanah akan dianalisis dengan pendekatan konflik menurut perspektif Marxian dan Dahrendorf. Penggunaan kedua teori konflik tersebut secara bersamaan tentu bukan karena pertimbangan *like and dislike* tetapi harus berdasarkan pada rasionalitas yang bersifat ilmiah. Pokok soal yang diangkat dalam penelitian ini, berdasarkan observasi awal peneliti, merupakan sebuah fenomena sosial yang bercirikan konflik. Pengklaiman, saling ancam, saling tuduh, sampai pada pertumpahan darah guna memperebutkan lahan tertentu merupakan gejala-gejala konflik yang muncul di daerah penelitian ini. Selanjutnya, dinamika konflik yang terjadi di lokasi penelitian harus dibaca dalam kerangka relasi elit dengan sumber konflik. Itu berarti, persoalannya tidak hanya menyangkut relasi atau struktur kepemilikan menurut tesis kaum

Marxian tetapi juga berhubungan erat dengan struktur otoritas untuk mengacu pada pandangan Dahrendorf. Gambaran singkat kedua teori tersebut dan bagaimana implikasinya dalam menjelaskan fenomena distorsi peran elit dalam konteks konflik tanah di lokasi penelitian akan dipaparkan berikut ini.

Teori Konflik Marx

Karl Marx (1818-1883) menjadi tokoh utama teori konflik. Banyak hal telah ditulis Marx, tetapi untuk tujuan penelitian ini, di sini hanya akan dipaparkan secara singkat mengenai teori analisis kelas¹⁷. Tesis utama Marx adalah bahwa masyarakat selalu tersusun atas kelas-kelas sosial yakni kelas pemilik alat produksi dan kelas yang tidak menguasai alat produksi. Alat produksi bisa berupa mesin, tanah, sumber daya, tenaga kerja, kemampuan, kekuasaan, informasi, dan lain-lain. Setiap kelas memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Kelas pemilik alat produksi selalu berupaya untuk mempertahankan bahkan menambah (mengakumulasi) alat produksinya, sementara kelas yang tidak memiliki alat produksi mempunyai kepentingan merebut alat produksi tersebut. Menurut kaum Marxian, hal inilah yang menjadi akar dari segala macam konflik di masyarakat. Oleh karena itu, sejarah perkembangan masyarakat merupakan sejarah perjuangan kelas-kelas tersebut.

¹⁷Lewis A. Coser, 1971. *Master of Sociological Thought*. New York, Chicago, San Fransisco, Atlanta: Harcourt Barace Jovanovich, , p. 48-50.

Pada masyarakat prapitalis atau masa feodal dimana tanah menjadi satu-satunya alat produksi maka pertentangan kelas terjadi antara kaum pemilik tanah dengan kaum yang tidak memiliki atau tidak menguasai tanah. Sejalan dengan perkembangan sejarah, maka pada masyarakat kapitalis, dengan industri sebagai moda produksi maka alat produksi berupa mesin, tenaga kerja, dan berbagai macam keahlian sebagai alat produksi utama¹⁸. Oleh karena itu, pertentangan kelas terjadi antara kaum pemilik modal dengan kaum buruh. Sebagaimana dijelaskan di atas, setiap kelas memiliki kepentingan masing-masing. Pada masa feodal, kelas pemilik tanah berupaya untuk menguasai tanah sebanyak-banyaknya dan kaum yang tidak memiliki tanah berupaya melakukan reforma agraria. Sementara itu, pada masyarakat kapitalis, kelas pemilik modal memiliki kepentingan untuk mengakumulasi modal sebanyak-banyaknya dan kaum buruh berupaya untuk memperoleh upah yang laik.

Dalam analisis kelas Marxian, kepentingan kelas selalu dihubungkan dengan kesadaran kelas. Kesadaran kelas adalah kesadaran kelas subyektif akan kepentingan kelas obyektif yang dimiliki bersama orang lain dalam posisi serupa dalam sistem produksi¹⁹. Itu berarti kesadaran kelas muncul ketika individu-individu membangun jaringan komunikasi dan membangun organisasi. Dengan formulasi yang lain, kesadaran kelas akan muncul pada saat berada bersama dengan orang lain dalam satu kelas tertentu.

¹⁸ Johnson, *Op. Cit.*, hal. 148-150

¹⁹ *Ibid.*, hal. 150

Kesadaran kelas inilah yang kemudian membangkitkan perjuangan kelas.

Dalam konteks penelitian ini, teori konflik Marx akan membantu menganalisis bagaimana struktur sosial masyarakat Manus-Desa Rana Mbeling. Ciri struktur sosial masyarakat Manus-Rana Mbeling yang bersifat dominatif antara kelas-kelas sosial mudah terlihat atau tercermin dalam kedudukan dan peran yang dilakukan oleh *tua golo* (pemilik hak ulayat) dengan *tua teno* (pembagi tanah/lahan). Dalam kerangka itu, upaya pengklaiman hak oleh *tua teno* atas beberapa bidang lahan tertentu perlu dikaji dan dibaca sebagai bentuk perlawanan kelas yang tidak memiliki alat produksi dan pertentangan kelas terhadap kelas yang memiliki alat produksi. Dalam observasi awal diketahui bahwa *tua teno* berupaya untuk mengkalim lahan atau tanah tertentu yang hak ulayatnya dimiliki oleh *tua golo*. Jika merujuk pada struktur sosial masyarakat Manggarai pada umumnya, hal seperti ini sebenarnya tidak boleh dilakukan karena *tua teno* hanya memiliki hak membagi tanah dan bukannya memiliki hak ulayat.

Teori Konflik Dahrendorf

Dahrendorf dianggap sebagai penerus Marx dalam mengembangkan teori konflik. Meskipun mendasarkan teorinya pada teori-teori konflik Marx, dalam beberapa hal Dahrendorf tidak sepakat dengan konsep Marx. Menurut Poloma²⁰, Dahrendorf “separuh penolakan,

separuh penerimaan, serta memodifikasi teori sosiologis Karl Marx”. Dalam hal pembagian kelas, Dahrendorf sepakat dengan Marx bahwa masyarakat dicirikan oleh dua kelas utama yakni kelas pemilik alat produksi dan kelas yang tidak memiliki alat produksi.

Perbedaan mendasar teori konflik Marx dan Dahrendorf terletak pada asumsi dasar struktur sosial masyarakat. Jika Marx melihat struktur kepemilikan sebagai landasan pembentukan kelas, maka Dahrendorf justru menekankan struktur kontrol dalam proses pembentukan kelas sosial²¹. Kritik Dahrendorf terhadap Marx dilakukan setelah ia meneliti tentang masyarakat industri. Menurut Dahrendorf, Marx terlampaui determinis dalam menganalisis pertentangan kelas. Marx tidak membayangkan bagaimana para pemilik modal dalam masyarakat industri menyerahkan wewenang dan tanggung jawabnya kepada para manajer perusahaan. Yang dilupakan Marx dalam analisis kelasnya, demikian Dahrendorf, adalah bahwa pada masa perkembangan industri, para managerlah yang memegang otoritas. Menurut Dahrendorf, kontrol terhadap alat produksilah yang paling menentukan pembentukan dan pertentangan kelas dalam masyarakat dan bukan pada struktur kepemilikan alat produksi.

Dahrendorf menunjukkan bukti bahwa otoritas terletak pada posisi seseorang ketika orang tersebut menjalankan perannya dalam masyarakat. Itu berarti, otoritas tidak terletak pada individu sebagaimana diakui Marx tetapi dalam posisi

²⁰Poloma, Margaret M. 2007. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

²¹ Johnson, *Op. Cit.*, hal. 183

seseorang ketika orang tersebut menjalankan perannya. Dalam konteks analisis konflik, asal usul konflik, menurut Dahrendorf, harus dicari dalam penataan peran sosial yang ditopang oleh ekspektasi dominasi atau penguasaan²². Itu berarti, guna menganalisis konflik kelas, maka identifikasi peran harus dilakukan.

Pada bagian lain Dahrendorf menyebutkan bahwa otoritas selalu berhubungan dengan subordinasi dan superordinasi. Otoritas bukanlah sesuatu yang konstan. Artinya, orang yang memegang otoritas akan mengendalikan mereka yang subordinat, namun karena sifatnya yang tidak stabil tersebut maka terdapat kemungkinan orang yang memiliki otoritas pada satu asosiasi akan menjadi subordinat pada asosiasi yang lainnya. Peluang munculnya konflik akan terjadi antara dua kelompok itu, sebab keduanya memiliki kepentingan yang berbeda.

Pada batas itu, Dahrendorf sebetulnya tidak hanya dipengaruhi Marx tetapi juga dipengaruhi oleh Weber. Pengaruh Weber pada Dahrendorf jelas terlihat ketika ia menggunakan konsep otoritas, kepentingan dan wewenang²³. Dahrendorf malah berkesimpulan bahwa konflik dalam masyarakat terjadi karena adanya perbedaan otoritas, kepentingan dan wewenang antara kelompok superordinat dan subordinat. Kelompok dominan selalu berusaha mempertahankan status quo

sedangkan kelompok yang subordinat berupaya melakukan perubahan.

Sebagaimana dijelaskan di bagian latar belakang tulisan ini, dalam struktur sosial masyarakat Manggarai, *tua golo* adalah pihak yang memiliki hak ulayat atas tanah atau lahan tertentu, sementara *tua teno* adalah pihak yang diberikan wewenang oleh *tua golo* untuk membagi tanah. *Tua teno* adalah satu-satunya institusi yang memiliki otoritas dan hak penuh untuk membagi tanah. Namun, perlu diingat bahwa dalam struktur sosial masyarakat Manggarai, *tua golo* dan *tua teno* sama-sama memiliki alat produksi berupa tanah, meskipun secara simbolis hak ulayat atas lahan tertentu berada sepenuhnya di tangan *tua golo*.

Di sini, klaim *tua teno* atas lahan tertentu yang hak ulayatnya dimiliki oleh *tua golo*, fenomena keterbatasan lahan, dan kurangnya komunikasi sosial antara aktor yang terlibat dalam konflik dapat dijelaskan dengan analisis konflik Marx sebagai bentuk perjuangan kelas dari kelas yang bukan pemilik alat produksi untuk mendapatkan hak milik. Struktur sosial yang demikian memberi ruang bagi *tua teno* untuk mengatur tentang berbagai hal yang berhubungan dengan lahan atau tanah tertentu.

Persoalannya, dalam perkembangan saat ini, ketika tanah komunal yang hak ulayatnya dimiliki oleh *tua golo* tersebut kemudian dibagikan oleh *tua teno* (atas persetujuan *tua golo*), maka setiap anggota kelompok suku (termasuk *tua teno*) berhak dan menjadi pemilik sah atas tanah atau lahan tersebut. Artinya, jika tanah dianggap sebagai alat produksi, maka sebagaimana anggota yang lain, *tua teno* sebetulnya juga

²² Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, 2008. Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern (Terj). Yogyakarta: Kreasi Wacana.

²³ *Ibid.*, hal. 284

memiliki alat produksi, karena *tua teno* juga memiliki tanah. Pergeseran struktur kepemilikan tanah atau lahan (dari komunal ke individual) berikut dinamika konflik yang menyertainya membutuhkan alat analisis yang lebih komprehensif. Itu berarti diperlukan alat analisis lain atau teori lain yang dapat menjelaskan fenomena tersebut. Sebab, persoalannya bukan saja terletak pada struktur kepemilikan tanah semata sebagaimana analisis kaum Marxian, tetapi pada struktur otoritas dalam perspektif teori konflik Dahrendorf. Dengan kata lain, konflik dapat saja disebabkan karena adanya perbedaan pemahaman dan perebutan otoritas dan wewenang antara *tua golo* dan *tua teno* dalam hal penguasaan dan kepemilikan tanah.

Merujuk pada tesis Dahrendorf tersebut maka tarik ulur, fragmentasi kepentingan berikut konflik tanah di daerah penelitian tidak dapat hanya dijelaskan dengan teori konflik Marx, sebab meskipun dalam struktur sosial masyarakat Manggarai pada umumnya, otoritas pembagi tanah sudah melekat pada *tua teno* dan *Tua golo* hanya menjadi pemilik alat produksi, kedua elit ini juga sama-sama memiliki alat produksi berupa tanah.

IV. RELASI TUA GOLO DAN TUA TENO: KONTEKS MANGGARAI TIMUR

Ketika memberi pengantar buku *Elit Dalam Perspektif Sejarah*, sejarawan Sartono Kartodirjo²⁴ pernah mengatakan bahwa salah satu fenomena khas dan masalah khusus

²⁴ Sartono Kartodirjo (Ed), 1983. *Elit dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: LP3ES, hlm. vii

bagi negara yang masih mengalami transisi seperti Indonesia adalah munculnya pergolakan di masyarakat. Pergolakan tersebut kemudian melahirkan perubahan struktur masyarakat. Perubahan struktur pada titik tertentu mendinamisasi peran, kedudukan dan kekuasaan kelompok sosial yang berpengaruh dalam masyarakat. Konsekuensinya adalah terjadinya pergeseran peran serta fungsi lembaga-lembaga lama ke lembaga baru. Di sini, elit berperan penting. Pada titik tertentu, elit tradisional berupaya mempertahankan status quo dan menganggap perubahan sebagai ancaman akan eksistensinya, sedangkan pada ekstrim yang lain muncul elit baru yang berperan dalam proses pembaruan dalam masyarakat.

Dalam konteks perubahan inilah maka menarik untuk mengkaji peran elit tradisional di Desa Rana Mbeling Kabupaten Manggarai Timur. Elit tradisional di sini adalah *tua golo* (Pemilik tanah/lahan) dan *tua teno* (Pembagi tanah). Eksistensi dan peran kaum elit tradisional ini menjadi penting ketika dalam beberapa dasawarsa terakhir, masyarakat di Kabupaten Manggarai (termasuk Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai Timur) selalu berkuat dengan persoalan pertanahan. Dalam batas tertentu kemudian konflik tanah selalu berhubungan dan bersinggungan dengan dua kelompok elit ini.

Sejauh ini belum ada penulis atau pun peneliti yang mencoba membuka tabir peran kedua elit ini. Walaupun *tua golo* dan *tua teno* disebut dalam beberapa penelitian, maka itu hanya untuk menghubungkan beberapa variabel yang akan dikaji. Beberapa penulis yang mengangkat Manggarai sebagai basis kajian tidak memberikan

perhatian serius pada kelompok ini. Verheijen²⁵ dalam *Manggarai dan Wujud Tertinggi* hanya melihat eksistensi orang Manggarai dalam relasinya dengan Wujud Tertinggi terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan ritual-ritual adat. Demikian pun Dami N. Toda²⁶ dalam *Manggarai Mencari Pencerahan Historiografi* hanya membahas perkembangan masyarakat Manggarai dari perspektif sejarah.

Seorang peneliti yang patut disebutkan di sini yang mempunyai perhatian pada kedua elit ini adalah Robert M.Z. Lawang²⁷. Meskipun Lawang membahas konflik tanah di Manggarai, tetapi dalam uraiannya dia juga melihat eksistensi dan peran kedua elit ini. Hal ini penting karena persoalan tanah yang menjadi masalah sosial utama di Manggarai selalu terkait dengan dua kelompok elit ini. Lawang tidak membahas secara khusus kedua elit ini tetapi mengaitkannya dengan keseluruhan uraian tentang konflik tanah di Manggarai.

Berbicara mengenai *tua golo* dan *tua teno* untuk konteks Manggarai (termasuk Manggarai Timur dan Manggarai Barat), harus selalu dikaitkan dengan *Wau', Beo'*,

Golo dan Lingko/Lodok. Verheijen, seperti dikutip Lawang²⁸ mendefinisikan *Wau'* sebagai keturunan menurut garis laki-laki (klan patrilineal). *Wau'* mendiami daerah atau wilayah tertentu yang disebut *beo/golo*. Secara harafiah *beo* dan *golo* memiliki pengertian yang sama yakni satu kesatuan tempat tinggal yang disebut kampung, namun menurut Lawang, kedua istilah itu memiliki perbedaan prinsipil. Lawang menggambarkan perbedaan tersebut sebagai berikut :

“.....semua *beo* dapat disebut *golo*, tetapi tidak semua *golo* dapat disebut *beo*. Ada lima karakter dasar yang ada dalam setiap *beo* yakni *mbaru tembong* (rumah tempat menyimpan gendang, tempat pelaksanaan ritus-ritua adat, tempat penyimpanan benda-benda pusaka, dan tempat pelaksanaan rapat-rapat penting), *compang* (mezbah persembahan), *wae teku* (mata air untuk menghidupi anggota *beo*), *boa'* (kuburan), dan *beo'* (kampung asal)....”²⁹.

Berdasarkan kategori di atas, maka *beo'* harus dimaknai tidak hanya secara fisik tetapi juga secara sosial. Sementara itu, *golo* tidak mesti *beo*, karena *golo* tidak memiliki unsur ke lima dari *beo* yakni *beo* sebagai kampung asal. Sebab dalam konteks ini, *beo* dianggap sebagai satuan kampung asal tempat tinggal nenek moyang. Di sini *golo* memiliki dua pengertian yakni pertama sebagai

²⁵ Jilis A.J. Verheijen, 1991. *Manggarai dan Wujud Tertinggi* (Terj). Jakarta: LIPI-RUL.

²⁶ Dami N. Toda. 1999. *Manggarai Mencari Pencerahan Historiografi*, Nusa Indah, Ende

²⁷ Lihat Robert. M.Z. Lawang. 1999. *Konflik Tanah di Manggarai Flores Barat*, Penerbit UI-Press; Robert M.Z. Lawang, 2004. *Stratifikasi Sosial di Cancar Manggarai Flores Barat Tahun 1950-an dan Tahun 1980-an*. Jakarta: Penerbit UI-Press.

²⁸ Lawang, *Op. Cit*, hlm. 41

²⁹ *Ibid*. hlm. 49-50

satuan pemukiman tradisional-tempat tinggal satu *wa'u*/klan tertentu (setelah membuka lahan kemudian menetap di situ untuk beberapa waktu tertentu dan masih memiliki ikatan yang kuat dengan *beo*/kampung asalnya) dan kedua sebagai satuan lahan yang dimiliki oleh klan atau suku tertentu.

Ketika lahan tersebut mulai dibuka dan didistribusikan kepada anggota klan/suku maka lahan itu disebut *lingko* atau *lodok*. Dalam praktiknya, bentuk *lingko* atau *lodok* menyerupai jaring laba-laba. *Golo* yang kemudian berubah menjadi *lingko/lodok* dimiliki oleh klan/suku tertentu yang dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut *tua golo*. Jadi, *tua golo* adalah tuan tanah/pemilik tanah. *Tua golo* memiliki kuasa, otoritas dan wewenang untuk mengatur *beo*, *lodok/lingko*, dan berbagai urusan adat. Di wilayah Manus-Manggarai Timur, tempat akan dilakukannya penelitian ini, *tua golo* juga disebut *tua beo*. *Tua golo* atau *tua beo* inilah yang lazim disebut kaum bangsawan dalam konteks Manggarai secara keseluruhan.

Sebagaimana digambarkan Marc Bloch dalam Kartodirdjo³⁰, kaum bangsawan, sebagai sebuah kelas sosial, tidak mengenal pekerjaan bertani. Kaum bangsawan hanya memanggul senjata dan menikmati berbagai macam hiburan. Dalam konteks yang sama, para *tua golo* kemudian menyerahkan hak untuk membagi tanah kepada orang kepercayaan yang disebut *tua teno*. *Tua teno*, oleh *tua golo* diberi wewenang mengurus tanah sekaligus

membagi tanah. Dalam hal membuka kebun baru/*ligko/lodok*, *tua teno* harus memintah izin *tua golo* terlebih dahulu, karena *tua gololah* yang memiliki hak ulayat atas lahan tertentu atau yang disebut *lingko* atau *lodok*. Jadi, *Tua teno* tidak memiliki hak ulayat atas tanah, kekuasaannya hanya sejauh menyangkut pembagian tanah/lahan yang disebut *lingko* atau *lodok*. Namun, *tua teno* mempunyai otoritas khusus yakni membagikan tanah kepada anggota yang lain. Dalam hal membagi tanah, *Tua teno* harus memberikan kesempatan kepada *tua golo* untuk memilih luas dan menentukan lahan yang akan dimilikinya (*tua golo*). Anggota suku yang lain menerma pembagian yang dilakukan oleh *tua teno*. Karena fungsi yang begitu penting dalam mengurus berbagai hal yang berhubungan dengan tanah pertanian maka kelompok ini oleh Scott³¹ disebut elit agraris. Relasi yang dibangun oleh elit ini bersifat patron-klien. Ciri utama relasi yang bersifat patron-klien terutama dibidang pertanian ini menurut Scott adalah ketidaksamaan dan sifat fleksibilitas relasi.

Penjelasan di atas menarik untuk diamati, manakala mengikuti pola pembagian elit yang dibuat Pareto. Mengikuti Pareto, masyarakat Manggarai dibagi dalam dua kelompok besar yakni kelompok elit dan kelompok massa. Kelompok elit terdiri dari dua kategori yakni elit yang memerintah dan elit yang tidak memerintah. Di sini *Tua golo* mewakili elit yang memerintah dan

³⁰ Kartodirdjo, *Op.Cit.*

³¹ James C. Scott, 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, hlm. 4

tua teno mewakili elit yang tidak memerintah. Meminjam Marx, dalam Giddens dan Held³², relasi peran yang terjadi jelas bersifat dominatif dan subordinatif, karena besarnya kekuasaan dan wewenang dari elit tertentu (*tua golo*), sementara elit yang lain (*tua teno*) bersifat menjalankan perintah.

Dalam konteks penelitian ini, relasi antara *tua golo* dan *tua teno* didefinisikan sebagai hubungan sosial yang terjadi antara *tua golo* dan *tua teno* dalam sebuah dalam sebuah struktur sosial dan struktur budaya dalam bingkai asimetris. Itu berarti, dalam konteks ini diasumsikan hubungan antara kedua elit ini ditandai oleh ketidakseimbangan antara yang memberi perintah (*tua golo*) dengan yang menjalankan perintah (*tua teno*). Dalam perkembangan yang lain, pada pihak yang menjalankan perintah diasumsikan timbul kesadaran untuk melawan pihak yang memberi perintah untuk memberikan hak dan wewenang yang lebih luas lagi; tidak hanya sekedar hak untuk membagi tanah. Artinya, dalam relasi tersebut, nuansa pertarungan kepentingan atau lebih tepat perebutan kepentingan dan perebutan pengaruh menjadi sasaran pokok.

V. KONFLIK TUA GOLO VERSUS TUA TENO: TENTANG STATUS, WEWENANG/OTORITAS, DAN KEKUASAAN

Mengacu pada pola relasi yang dibangun antara *tua golo* dan *tua teno*

di atas, sebenarnya dapat diketahui apa yang menjadi basis material konflik kedua elit ini. Pertarungan status, otoritas, kekuasaan dan wewenang kemudian menjadi nampak dalam perjuangan kelas tertentu. Menarik bahwa perjuangan *tua teno* untuk merebut atau minimal meminta perhatian *tua golo* dilakukan melalui alat produksi yang disebut tanah. Dengan merujuk pada pandangan kaum Weberian³³, hal ini dapat dimengerti karena tanah merepresentasi status, otoritas, kekuasaan dan wewenang *tua golo*. Oleh karena itu, dengan mengklaim tanah tertentu maka *tua teno* sebetulnya sedang mengerjakan proyek penyamarataan hak dan wewenang.

Dalam penelitian ini, konsep status, otoritas/wewenang dan kekuasaan lebih mengacu pada pandangan Weber. Dalam pandangan kaum Weberian³⁴, status berkaitan dengan distribusi kehormatan sosial dalam dalam suatu komunitas. Status adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasarkan kelas sosialnya. Kelas sosial salah satunya ditentukan oleh wewenang dan kekuasaan. Menurut Weber dalam Giddens dan Held³⁵ kekuasaan adalah “kesempatan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan kehendaknya dalam bentuk suatu aksi sosial baik terhadap mereka yang menentang kehendak itu maupun terhadap yang mengikutinya”. Menurut Weber, kekuasaan dapat

³² Anthony Giddens dan David Held (eds), 1982. *Power Class and Conflict*. Los Angeles: University of California Press, p. 19

³³E. Laeyendecker, 1991. *Tata, Perubahan dan Ketimpangan*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

³⁴ Giddens dan Held. *Op.Cit.* hlm 24

³⁵ *Ibid.*, hlm 23

menjadi landasan bagi terbentuknya kehormatan sosial. Kehormatan sosial dijamin oleh apa yang disebut sebagai tertib hukum. Tertib hukum inilah yang nantinya menjadi alasan bagi pemegang kekuasaan atau otoritas untuk mempertahankan kekuasaannya. Namun, di sini Weber belum menjelaskan secara pasti sistem hukum mana yang dimaksudkannya; apakah mengacu pada hukum formal atau adat atau tertulis atau tidak tertulis. Dalam konteks kekuasaan lokal, kekuasaan atau otoritas tua golo dapat ditopang oleh sistem atau tertib adat³⁶.

Sementara itu, otoritas dalam perspektif kaum Weberian dikaitkan dengan kekuasaan yang sah menurut struktur sosial politik tertentu. Di sini otoritas dipahami sebagai kekuasaan untuk memerintah dan tugas untuk patuh³⁷. Weber membagi otoritas menjadi tiga yakni otoritas tradisional, otoritas karismatis dan otoritas legal. Otoritas tradisional yaitu otoritas yang dilandasi oleh kesucian tradisi. Dalam otoritas tradisional, kelompok dominan dianggap sebagai kelompok yang given yang memiliki hak penuh untuk memerintah berdasarkan tradisi. Rakyat diikat oleh ikatan ketergantungan personal dan tradisi kesetiaan. Pada otoritas kharismatis, kekuasaan seorang pemimpin dianggap berasal dari kekuatan supranatural dan oleh karena itu terdapat kehendak dari para pengikut untuk mematuhi semua perintah dari sang pemimpin. Tipe otoritas legal dilegitimasi oleh keyakinan

formalistik pada supremasi hukum. Di sini aturan hukum dibuat untuk menciptakan keteraturan sosial.

Studi tentang upaya *tua teno* merebut *hak golo* belum pernah dilakukan selama ini. Lawang³⁸, dalam salah satu temuannya tentang konflik tanah di Manggarai menyebutkan bahwa yang berkonflik di Manggarai adalah *tua golo vs tua golo* karena adanya saling klaim masing-masing pihak terhadap lahan tertentu. Artinya, *tua teno* tidak pernah membuat "ulah". Konflik *antartua golo* dalam konteks perebutan lahan di Manggarai tidak hanya dibaca sejauh menyangkut perebutan alat produksi yaitu tanah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam paparan terdahulu tulisan ini, tanah merupakan simbol kekuasaan, sumber wewenang dan otoritas. *Tua golo* adalah pihak yang menguasai hak ilayat atas tanah. Itu berarti, otoritas dan kekuasaan atas lahan tertentu melekat padanya. Pada bagian lain, *tua teno* memiliki wewenang tertentu. *Tua teno* adalah pihak yang membagi tanah ketika sebuah lahan (*lingko*) dibuka. Wewenang *tua teno* hanya pada tataran seperti itu, tetapi wewenang seperti itu dianggap mutlak, sebab tidak ada pihak lain yang boleh membagi tanah dan membuka lahan (termasuk *tua golo*) kecuali dilakukan oleh *tua teno*.

Pada bagian lain, Ngamal³⁹ mencoba mengangkat persoalan delegitimasi peran *tua teno* dalam

³⁶ Lawang, *Op.Cit.*, hlm. 9

³⁷ Denis Wrong (Ed.). 2003. *Max Weber Sebuah Khazanah*. Yogyakarta: Ikon Teralitera, hlm. 228-235

³⁸ Lawang, *Op.Cit.*, hlm. 92-96

³⁹ Yosefina Yasinta Ngamal, 2008. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Berkurangnya Loyalitas Warga Masyarakat terhadap Peran *Tua Teno* dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah, Skripsi Sarjana, Jurusan Sosiologi, Fisip UNDANA, Kupang

mengelola distribusi tanah di Manggarai. Dalam penelitiannya tersebut Ngamal menyebutkan bahwa salah satu sumber delegitimasi adalah transformasi sosial dalam bidang pendidikan. Orang yang berpendidikan yang datang dari kota, rata-rata belum bekerja, berupaya membuka lahan baru atau malah menegasikan peran *tua teno*. Walaupun demikian, kesimpulan seperti ini patut diperiksa ulang, sebab logika pendidikan sebagai alat transformasi menjadi sangat kabur ketika manusia yang mengaku diri berpendidikan menegasikan sendiri pendidikan dan pengetahuan yang dimilikinya yang termanifestasi dalam berbagai gerakan dan upaya delegitimasi otoritas yang berwenang mengurus adat/tanah. Semua penelitian ini dilakukan di Kabupaten Manggarai.

Berbeda di Kabupaten Manggarai, di wilayah Manus (Desa Rana Meling) Kabupaten Manggarai Timur, konflik tanah (konflik yang melibatkan beberapa pihak dengan tanah sebagai obyek konflik) terjadi antara *tua golo* dengan *tua teno*. Meskipun konflik antara *tua golo* tetap ada, tetapi jumlahnya tidak sebanyak konflik antara *tua teno*. Minimnya konflik antara *tua golo* di Manggarai Timur disebabkan karena di sana, antara *tua golo* memiliki batasan yang jelas soal kepemilikan tanah (hak ulayat) setiap suku.

Konflik antara dua kelompok elit tradisional ini (baik antara *tua golo* vs *tua golo* ataupun *tua golo* vs *tua teno*) kemudian membawa konsekuensi tertentu. Sebagaimana digambarkan

Lawang⁴⁰, konflik yang awalnya hanya melibatkan antara dua elit (*person to person*) turut melibatkan anggota kelompok yang lain. Dahrendorf dalam Ritzer dan Goodman⁴¹, menyebutkan bahwa ketika konflik melibatkan banyak orang/massa maka intensitas dan akibat yang ditimbulkan oleh konflik itu akan semakin besar/tinggi. Dalam perkembangan yang sama, konflik akan semakin memperkuat integrasi internal anggota kelompok⁴². Artinya, setiap anggota kelompok akan berafiliasi dengan kelompok mayoritasnya. Afiliasi dengan kelompok mayoritas mempunyai dua tujuan utama, pertama untuk mencari perlindungan dan kedua untuk menyokong kekuatan kelompok dalam menghadapi arogansi dan tekanan kelompok lain. Hasil temuan Lawang tentang konflik tanah di Manggarai menyebutkan bahwa masing-masing kelompok rela berkorban bahkan nyawa sekalipun untuk mempertahankan gengsi dan status. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai unsur stratifikasi dan kelas sosial menjadi taruhan wajib bagi masyarakat tanpa memperdulikan dampak yang ditimbulkannya.

Dalam buku *Perlawanan Kaum Tani*, James Scott⁴³, menggambarkan dengan tepat transformasi sosial yang terjadi di pedesaan Asia Tenggara pascakolonialisme. Pascakolonial

⁴⁰ Lawang, *Op.Cit.* hlm. 91

⁴¹ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2008. *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* (Terj). Yogyakarta: Kreasi Wacana.

⁴² Coser, *Op.Cit.*, hlm. 133

⁴³ Scott, *Op.Cit.*, 25

merupakan era di mana muncul dan menguatnya kekuasaan lokal yang berada di tangan para elit lokal. Kondisi ini mempengaruhi struktur sosial masyarakat yang oleh Scott dibagi menjadi tiga tema besar, yakni proses diferensiasi sosial, pertumbuhan negara kolonial, dan komersialisasi pertanian dan konsentrasi pemilikan lahan. Selanjutnya, Scott⁴⁴ menyebutkan bahwa komersialisasi pertanian membawa dampak komersialisasi dan neraca pertukaran patron-klien. Relasi patron-klien dengan berbagai variannya ini dapat menjadi penyebab munculnya benih-benih konflik di masyarakat, di antaranya dapat disebut sebagai berikut : kepemilikan lahan yang tidak seimbang, pertumbuhan populasi, fluktuasi harga produsen-konsumen di bawah pertanian komersial, hilangnya sumber daya lepas (lahan yang belum dibuka, padang gembala bersama, bahan bakar gratis, dan lain-lain), memburuknya mekanisme pemerintahan desa, negara kolonial melindungi hak milik dari kelas pemilik tanah.

VI. PENUTUP

Relasi sosial antara *tua golo* dengan *tua teno* memiliki pola yang khas. Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa pola relasi antara *tua golo* dengan *tua teno* bersifat subordinatif dan koordinatif. Relasi yang bersifat subordinatif terjadi karena struktur sosial masyarakat Manggarai secara keseluruhan menempatkan salah satu elit pada posisi sosial di atas dari

yang lain. Di sini, *tua golo* memiliki posisi yang penting dibanding *tua teno*. Sebab, *tua golo* adalah kepala kampung yang menentukan posisi *tua teno* sebagai orang atau lembaga yang mengurus atau membagi tanah. Implikasi dari model relasi seperti ini adalah *tua teno* harus meminta persetujuan *tua golo* dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas adat dan tanah. Sementara relasi yang bersifat koordinatif terjadi ketika *tua golo* dan *tua teno* duduk bersama dalam satu forum untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan kampung atau persoalan sosial lainnya.

Berdasarkan berbagai kajian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber konflik diidentifikasi dalam satu hal utama, yakni tanah. Di sini tanah menjadi simbol status, kekuasaan dan wewenang. Pergulatan perebutan kekuasaan dan wewenang dengan tanah sebagai sumber utama diasumsikan memunculkan konflik yang berkepanjangan. Konflik ini kemudian diperparah oleh berubahnya struktur sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan melalui monetisasi tanah dan sumber daya di desa sebagaimana digambarkan Scott di atas.

⁴⁴ *Ibid.*, 30

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alfian, M M. Alfian. 2006. "Relevansi Studi Elit Di Indonesia". Dalam Kata Pengantar Editor buku *Elit dan Masyarakat*, T. B. Bottomore. Jakarta: Akbar Tanjung Institute.
- Bottomore, T. B., 2006. *Elit dan Masyarakat* (Terj). Jakarta: Akbar Tanjung Institute
- Clark, Samuel (Ed.), 2004, *Bukan Sekedar Persoalan Kepemilikan: Sepuluh Studi Kasus Konflik Tanah dan Sumber Daya Alam dari Jawa Timur dan Flores*, Conflict and Community Development Research and Analytical Program Indonesian Social Development Paper No. 4
- Coser, Lewis A. 1971. *Master of Sociological Thought*. New York, Chicago, San Fransisco, Atlanta: Harcourt Barace Jovanovich.
- Giddens, Anthony dan David Held (eds). 1982. *Class, Power and Conflict*. Los Angeles: University of California Press.
- Johnson, Doyle Paul. 1986., *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid II* (terj. Robert R.Z. Lawang). Jakarta: PT. Gramedia.
- Johnson, Doyle Paul. 1988 *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I* (terj. Robert R.Z. Lawang). Jakarta: PT. Gramedia.
- Kartodirjo, Sartono (Ed). 1983. *Elit dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: LP3ES,
- Keech-Marx, Ulla. 2002. "Komersialisasi Tenunan Songke:Dampaknya Terhadap Masyarakat Manggarai Studi Kasus di Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, Flores, NTT". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, kerjasama dengan Australian Consortium For In-Country Indonesian Study (Acicis) dan South-East Asia Centre Australian National
- Keller Suzanne.1995. *Penguasa dan Kelompok Elit* (Terj). Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Laeyendecker, E. 1991. *Tata, Perubahan dan Ketimpangan*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Lawang Robert. M.Z, 1999. Robert M.Z. Lawang, *Konflik Tanah di Manggarai Flores Barat*, Jakarta: Penerbit UI-Press.
- Lawang, Robert M.Z., 2004. *Stratifikasi Sosial di Cancar Manggarai Flores Barat Tahun 1950-an dan Tahun 1980-an*. Jakarta: Penerbit UI-Press.
- Poloma, Margaret M. 2007. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, 2008.*Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* (Terj). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Ritzer,George 2003. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Terj). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Scott, James C. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Toda, Dami N.,1999. *Manggarai Mencari Pencerahan Historiografi*. Ende: Nusa Indah.
- Verheijen, Jilis A.J.. 1991. *Manggarai dan Wujud Tertinggi* (Terj). Jakarta: LIPI-RUL.
- Wrong, Denis (Ed.). 2003. *Max Weber Sebuah Khazanah*. Yogyakarta: Ikon Teralitera.
- Ngamal, Yosefina Yasinta 2008. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Berkurangnya Loyalitas Warga Masyarakat terhadap Peran Tua Teno dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah, Skripsi Sarjana, Jurusan Sosiologi, Fisip UNDANA, Kupang

